

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

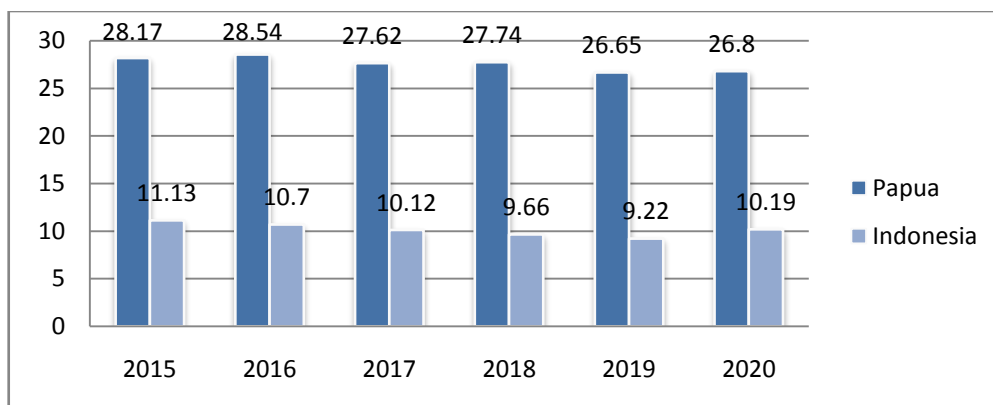
Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Kuznet, dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas negara terkait penyediaan berbagai komoditas ekonomi untuk penghuninya, ada peningkatan kapasitas kemajuan teknologi, kelembagaan, dan ideologis ke kondisi yang ada (Todaro, 1997). Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan aktivitas dalam perekonomian yang mengarah pada produksi barang dan jasa di masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran Masyarakat (Sukirno, 1994) Pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang bisa dikatakan sebagai proses peningkatan output per kapita. Lebih tingginya pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan lebih tinggi juga peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut atau sebuah negara.

Prospek ekonomi baru memperhitungkan tujuan utama pembangunan perekonomian tidak hanya pertumbuhan PDB, tetapi juga pengentasan kemiskinannya, mengatasi ketimpangan pendapatan dan penawaran pekerjaan dalam konteks pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1997). Dari perspektif ini dapat dijelaskan bahwa kemiskinan telah menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan dalam pembangunan ekonomi yang mana pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari PDB, tetapi juga oleh Bagaimana suatu negara bisa mengatasi kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan yang paling banyak dihadapi di kabupaten atau kota di Indonesia bahkan juga dunia tetapi yang

paling banyak menghadapi masalah kemiskinan yaitu di negara berkembang. Menurut Vincent (2009), permasalahan kemiskinan adalah masalah yang sering dihadapi di negara-negara berkembang. Menurut BPS (2020b), yang dimaksud dengan kemiskinan adalah individu yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Di Indonesia jumlah penduduk miskin pada September tahun 2019 yaitu sebesar 24,79 juta jiwa hal ini menurun 0,88 juta jiwa dibandingkan September tahun 2018 (BPS, 2020a).

Salah satu provinsi yang mempunyai permasalahan kemiskinan yang kompleks yaitu Provinsi Papua. Menurut data Bps, Provinsi Papua adalah provinsi yang setiap tahunnya selalu memiliki tingkat kemiskinan (*Head Count Index/HCI*) diatas level nasional dan populasi penduduk miskinnya pada tahun 2020 sebesar 275,5 juta jiwa.



Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua dan Indonesia (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020, diolah

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas Tingkat Kemiskinan di Papua mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Di tahun 2016 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,37% di tahun 2017 tingkat kemiskinan sempat mengalami penurunan sebesar 0,92%, di tahun 2018 tingkat kemiskinan kembali

mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,12% tetapi di tahun 2019 tingkat kemiskinan mengalami penurunan lagi sebesar 1,09% akan tetapi pada tahun 2020 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,23% dari hasil keterangan tersebut bisa dikatakan tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami fluktuatif pada periode tahun 2015-2020.

Tabel 1. 1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2019-2020

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)		Presentase Penduduk Miskin (%)	
	2019	2020	2019	2020
Aceh	809.76	833.91	15.01	15.43
Sumatera Utara	1260.5	1356.72	8.63	9.14
Sumatera Barat	343.09	364.79	6.29	6.56
Riau	483.92	491.22	6.9	7.04
Jambi	273.37	288.1	7.51	7.97
Sumatera Selatan	1067.16	1119.65	12.56	12.98
Bengkulu	298	306	14.91	15.3
Lampung	1041.48	1091.14	12.3	12.76
Kep. Bangka Belitung	67.37	72.05	4.5	4.89
Kep. Riau	127.76	142.61	5.8	6.13
Dki Jakarta	362.3	496.84	3.42	4.69
Jawa Barat	3375.89	4188.52	6.82	8.43
Jawa Tengah	3679.4	4119.93	10.58	11.84
Di Yogyakarta	440.89	503.14	11.44	12.8
Jawa Timur	4056	4585.97	10.2	11.46
Banten	641.42	857.64	4.94	6.63
Bali	156.91	196.92	3.61	4.45
Nusa Tenggara Barat	705.68	746.04	13.88	14.23
Nusa Tenggara Timur	1129.46	1173.53	20.62	21.21
Kalimantan Barat	370.47	370.71	7.28	7.24
Kalimantan Tengah	131.24	141.78	4.81	5.26
Kalimantan Selatan	190.29	206.92	4.47	4.83
Kalimantan Timur	220.91	243.99	5.91	6.64
Kalimantan Utara	48.61	52.7	6.49	7.41
Sulawesi Utara	188.6	195.85	7.51	7.78
Sulawesi Tengah	404.03	403.74	13.18	13.06
Sulawesi Selatan	759.58	800.24	8.56	8.99
Sulawesi Tenggara	299.97	317.32	11.04	11.69
Gorontalo	184.71	185.31	15.31	15.59
Sulawesi Barat	151.87	159.05	10.95	11.5
Maluku	319.51	322.4	17.65	17.99
Maluku Utara	87.18	87.52	6.91	6.97
Papua Barat	207.59	215.22	21.51	21.7
Papua	900.95	912.23	26.55	26.8
Indonesia	24785.87	27549.69	9.22	10.19

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Hal itu terlihat dari data penduduk miskin yang dimiliki Badan Pusat Statistik. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 adalah 247.858.870 orang atau 9,22%. Kemudian pada tahun 2020, angka kemiskinan Indonesia mengalami kenaikan mencapai 275.496.900 orang atau 10.19% kenaikan ini dikarenakan adanya pandemi yang menyerang seluruh wilayah Indonesia. Dibandingkan dengan provinsi lainnya, data di atas menunjukkan Papua memiliki penduduk miskin terbesar di Indonesia diantara 33 provinsi lainnya. Angka kemiskinan Papua adalah 900,95 ribuan pada tahun 2019 atau 26,55%. Namun di tahun 2020, angka kemiskinan Papua bertambah menjadi 912,23ribu orang atau 26,8%.Tingkat kemiskinan di Papua menjadi tingkat kemiskinan tertinggi karena kawasan tersebut sudah tertinggal sejak lama atau bisa dikatakan Papua masih belum terjamah program dari pemerintah dengan baik.

Salah dua faktor yang mempengaruhi kemiskinan yaitu Indeks Pembangunan Manusia dan pengangguran. Menurut Saputra (2011), hal yang tidak dapat dilakukan secara terpisah dalam mengatasi masalah kemiskinan yaitu masalah pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan masalah-masalah lainnya yang masih berkaitan dengan masalah kemiskinan. Estrada & Wenagama (2020), melakukan penelitian mengenai kemiskinan di Provinsi Bali periode 2009–2013 yang mendapatkan hasil bahwa laju pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Tabel 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua 2015-2020

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2015	3,99
2016	3,35
2017	3,62
2018	3,2
2019	3,65
2020	4,28

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Pada tabel 1.2 ini persentase pengangguran terbuka di Provinsi Papua dari tahun 2015 hingga 2020 terlihat berfluktuasi. Pada tahun 2015 persentase tingkat pengangguran terbuka adalah 3,99%. Pada tahun 2016 turun 3,35%, kemudian naik 3,62% pada tahun 2017, turun 0,42% menjadi 3,20% pada tahun 2018, dan naik 0,45% menjadi 3,65% pada tahun 2019, ditahun 2020 mengalami kenaikan lagi sebesar 0,63% menjadi 4,28%.Tingkat pengangguran akan menimbulkan masalah lain, seperti kemiskinan. Salah satu mekanisme utama untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan distribusi di negara berkembang adalah dengan memberikan upah yang sesuai dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin. Oleh karena itu, peningkatan kesempatan kerja merupakan faktor penting fokus pada apa saja yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan (Arsyad, 2010).

Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan di suatu daerah. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk memperoleh hasil pembangunan dari segi pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Menurut BPS (2020), Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga dimensi dasar, yaitu umur

yang panjang, hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. IPM yang rendah dapat menjadi salah satu faktor produktivitas tenaga kerja di masyarakat juga rendah, dan produktivitas yang rendah menyebabkan juga pendapatan rendah, sehingga pendapatan yang rendah menyebabkan sejumlah besar orang menjadi miskin (Sukmaraga, 2011).

Tabel 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua 2015-2020

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (%)
2015	57.25
2016	58.05
2017	59.09
2018	60.06
2019	60.84
2020	60,44

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Pada Tabel 1.3 terlihat pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2015 sampai 2019. Dari tahun 2015 hingga 2019, Provinsi Papua menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahunnya. Sejak 2015, Indeks Pembangunan Manusia menjadi 57,25%, kemudian terus meningkat hingga 60,84% pada 2019, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,40% menjadi 60,44%

Pembangunan ekonomi meliputi perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Terlihat dari perkembangan indikator ekonomi yang ada, ketimpangan ekonomi suatu daerah berhasil dikurangi. Indikator tersebut dapat dilihat dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Kemudian semakin tinggi PDRB suatu daerah semakin besar potensi sumber pendapatan di suatu daerah

tertentu. Berikut adalah laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 di Provinsi Papua dari tahun 2015 hingga 2020.

Tabel 1. 4 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Konstan 2010 Provinsi Papua tahun 2019-2020 (Miliar Rupiah)

Tahun	Laju Pertumbuhan PDRB (%)
2015	7,35
2016	9,14
2017	4,64
2018	7,37
2019	-15,72
2020	2,31

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Dalam tabel 1.4 persentase pertumbuhan PDRB provinsi Papua berfluktuasi dari tahun 2015 hingga 2020. Pada 2019, perekonomian Papua menyusut sampai -15,72%. Menurut(BPS, 2020a), kontraksi pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kelompok usaha pertambangan dan penggalian menjadi -43,21%. Dari sisi pengeluaran, kontraksi pertumbuhan disebabkan oleh ekspor luar negeri yang turun -69,10%.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa diperlukannya penelitian lebih lanjut untuk melihat hubungan pengaruh antara Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Papua. Sehingga peneliti tertarik dengan penelitian tersebut. Terdapat beberapa penelitian serupa yang menggunakan tingkat kemsikinan Papua sebagai studi penelitian, namun belum adanya penelitian terbaru yang membahas mengenai objek penelitian yang sama dengan kombinasi variabel bebas pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka juga memberikan peluang penelitian ini untuk kembali melakukan studi empiris dengan studi kasus tingkat kemiskinan di Papua. Termasuk dengan adanya

pembaruan data yang bisa saja dapat mempengaruhi hasil terbaru terhadap penelitian dengan topik tingkatkemiskinan di Papua. Selain itu terdapat perbedaan penggunaan teknik analisis yang digunakan dimana dalam penelitian ini menggunakan *fixed effect model* (FEM) sebagai alat analisis data panelnya. Pada akhirnya, beberapa alasan yang telah diuraikan diatas memberikan inspirasi kepada peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan: “Data Panel 2015-2020 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Papua ?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Papua ?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Papua?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Papua.
2. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

3. Menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya dengan landasan teori yang sama yakni hubungan pertumbuhan, IPM dan TPT terhadap angka kemiskinan. Yang mana menguji secara empiris bagaimana secara teoritis variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan komparatif untuk penelitian kedepannya pada subyek yang sama, dan diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten dan Kota di Papua.